



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 72
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan sistem aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa dengan pendirian unit sekolah baru SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR BALI

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

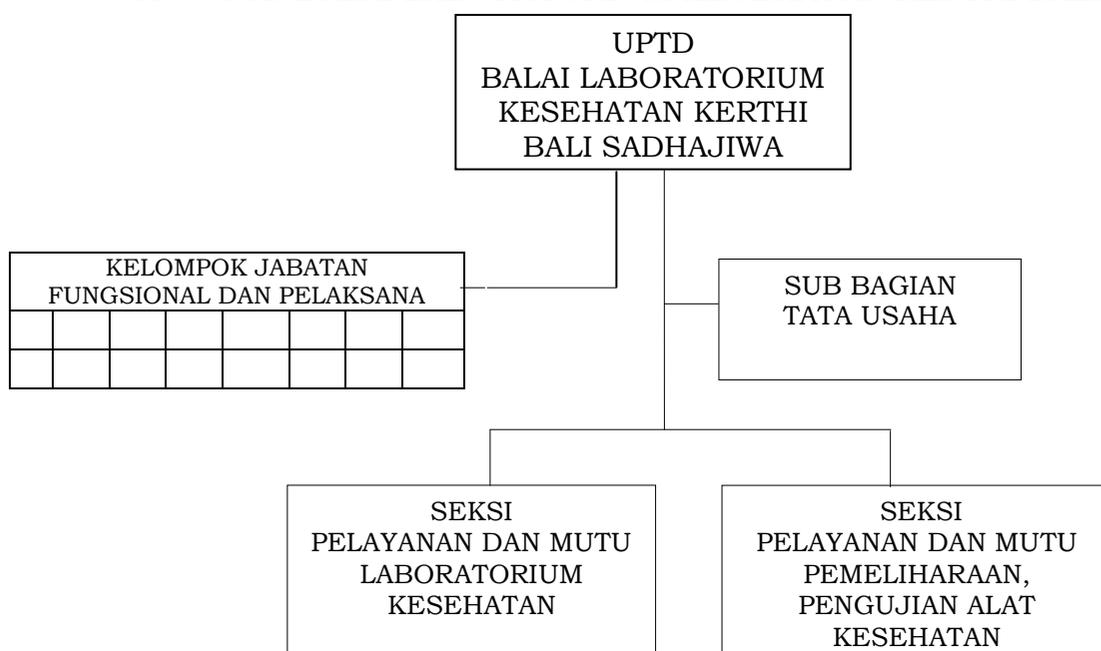


LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 BALI

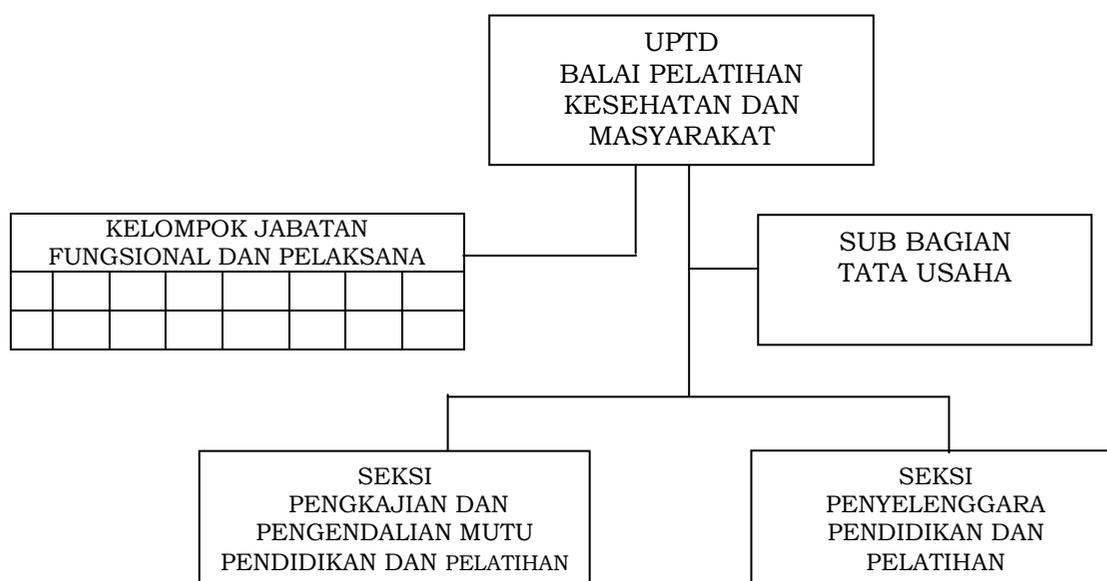
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DI LINGKUNGAN DINAS DAN BADAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

I. UPTD PADA DINAS KESEHATAN

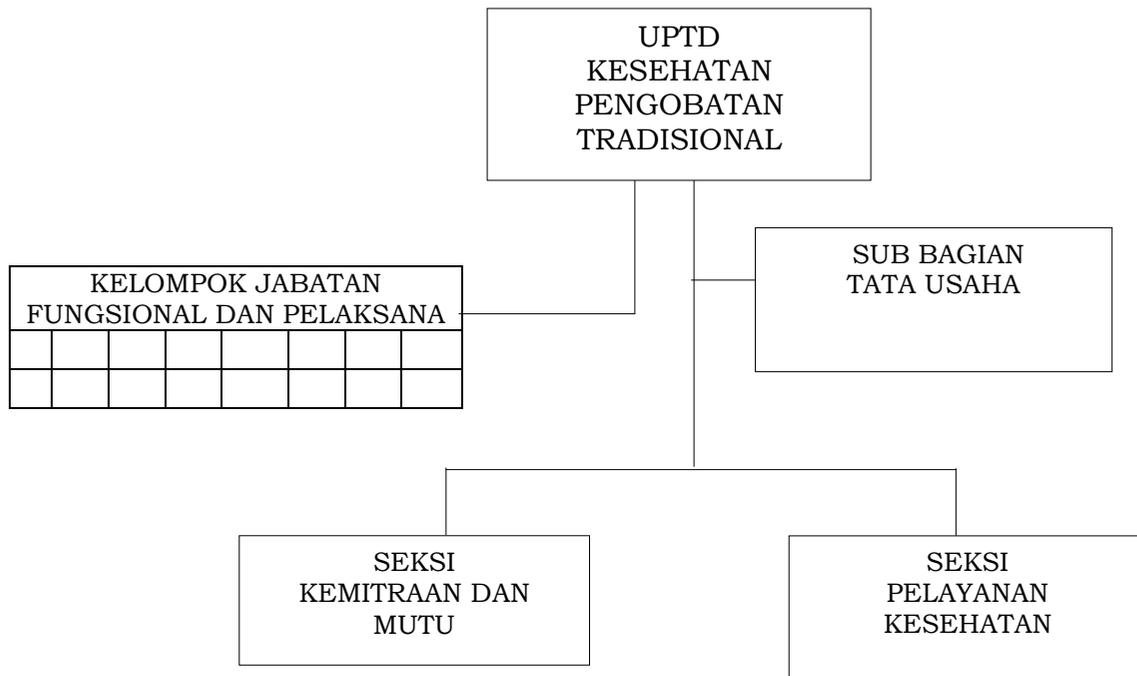
A. UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN *KERTHI BALI SADHAJIWA*



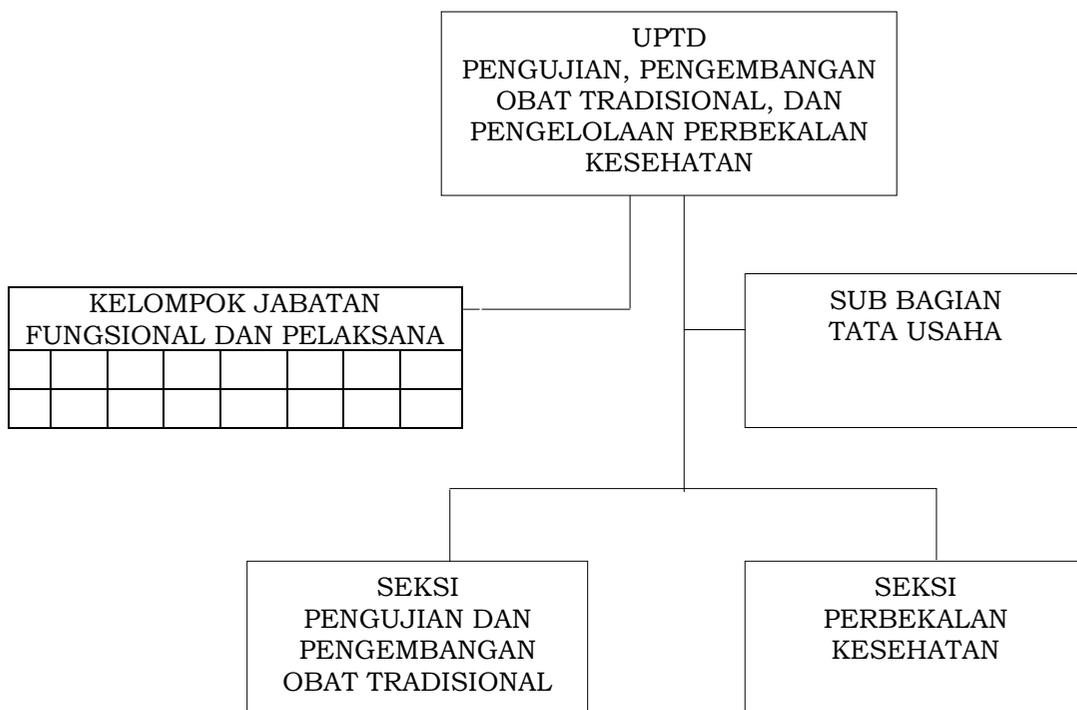
B. UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT



C. UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL

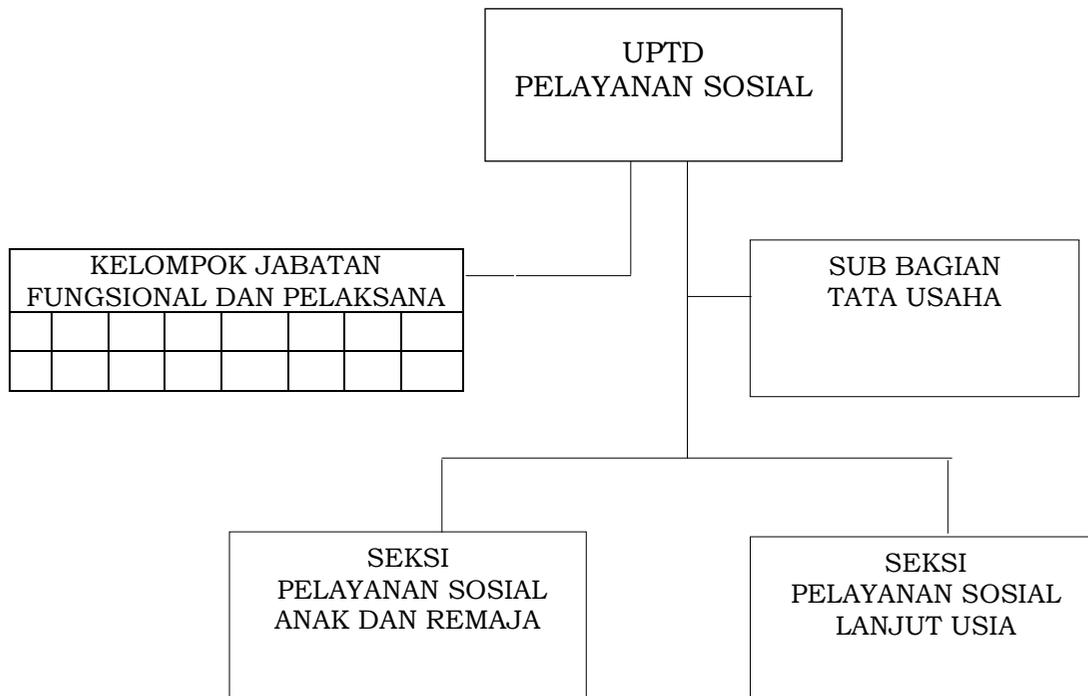


D. UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN

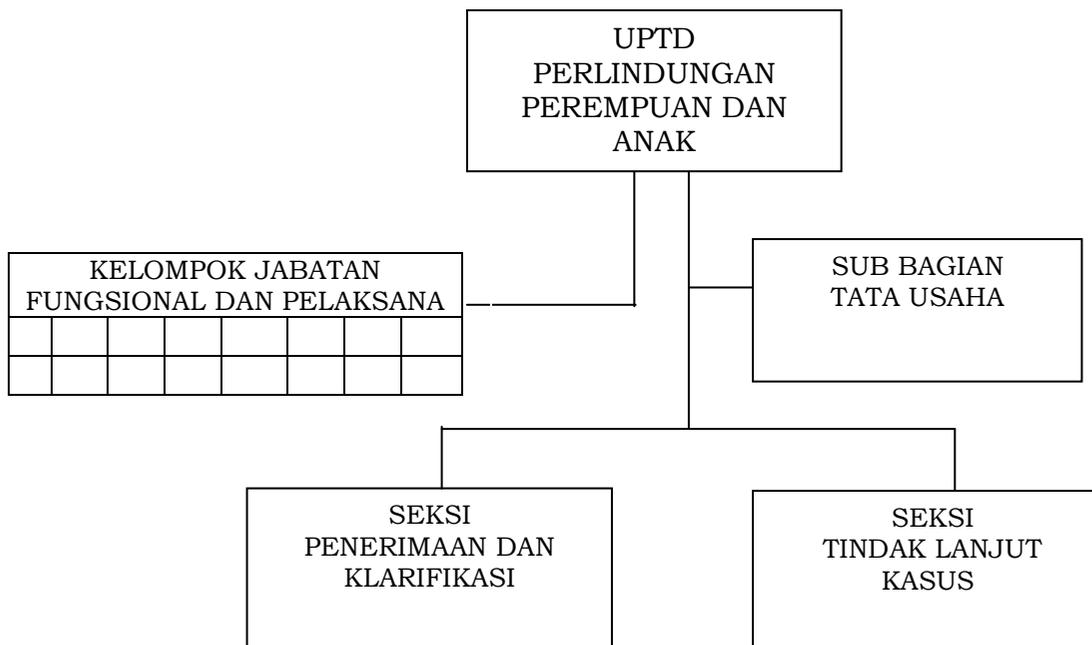


II. UPTD PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

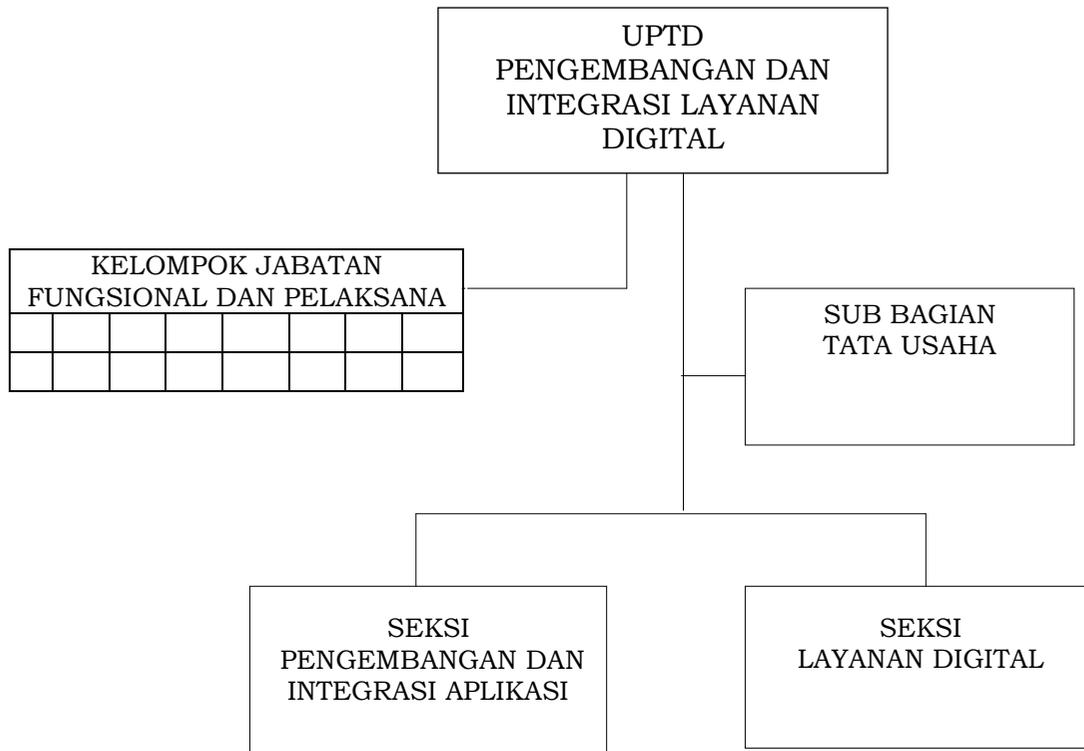
A. UPTD PELAYANAN SOSIAL



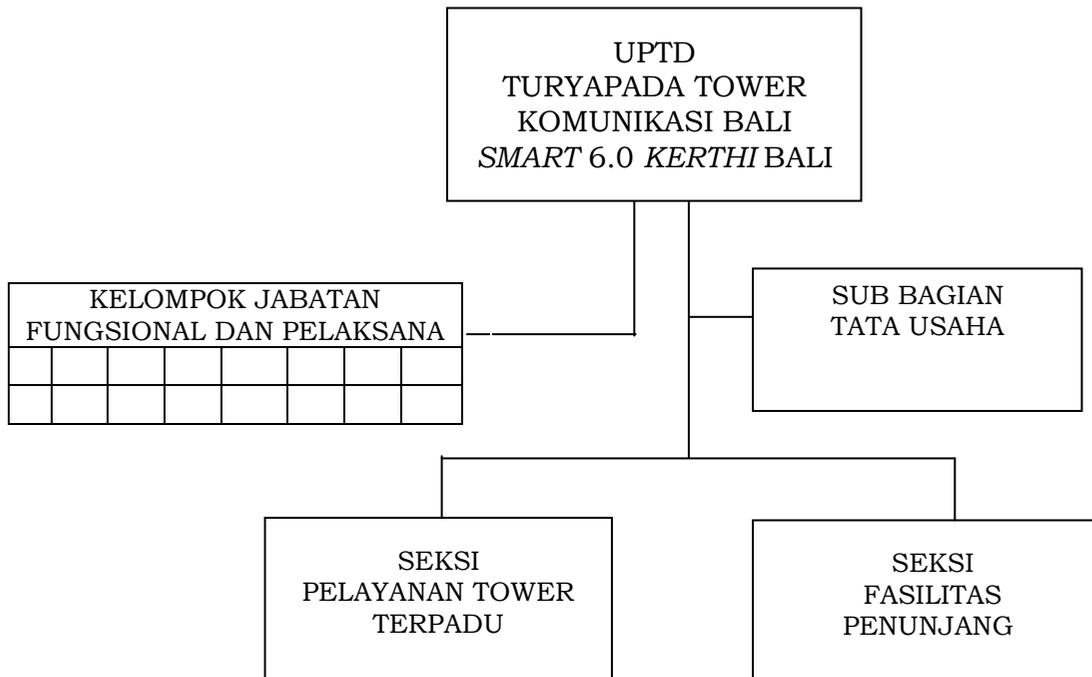
B. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



III. UPTD PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
 A. UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL

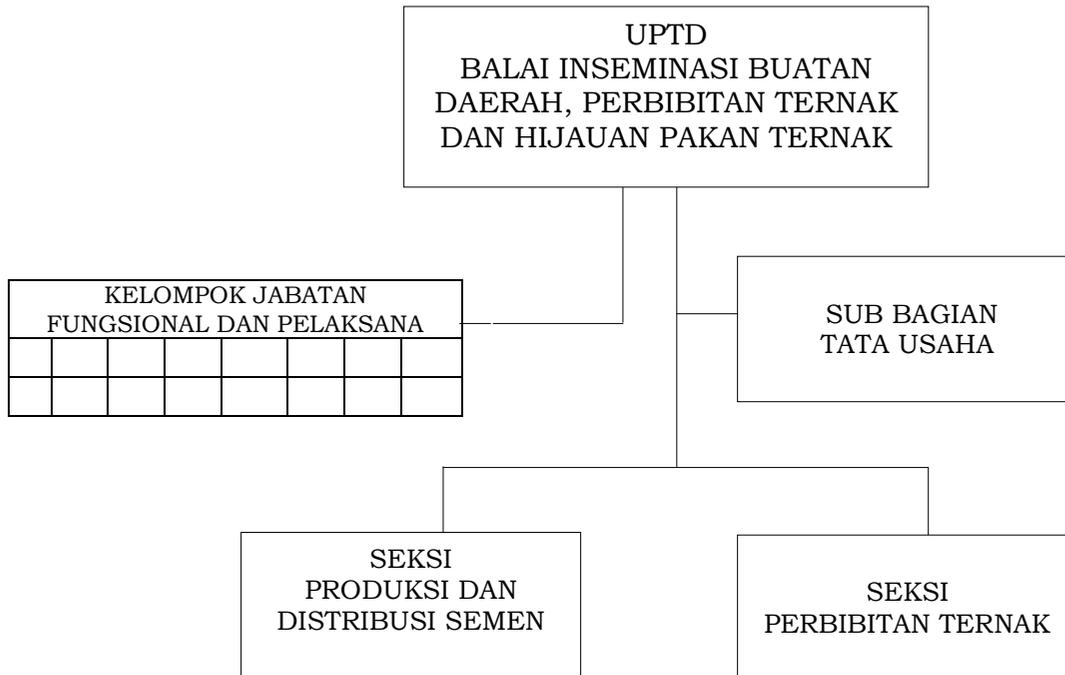


B. UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI *SMART 6.0 KERTHI BALI*

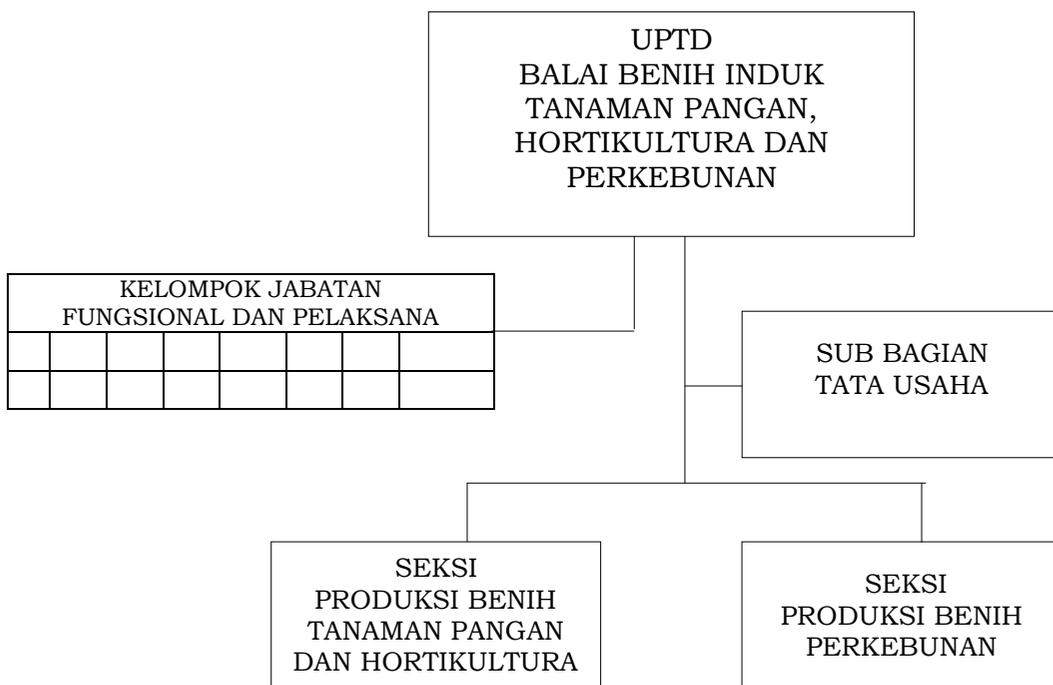


IV. UPTD PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

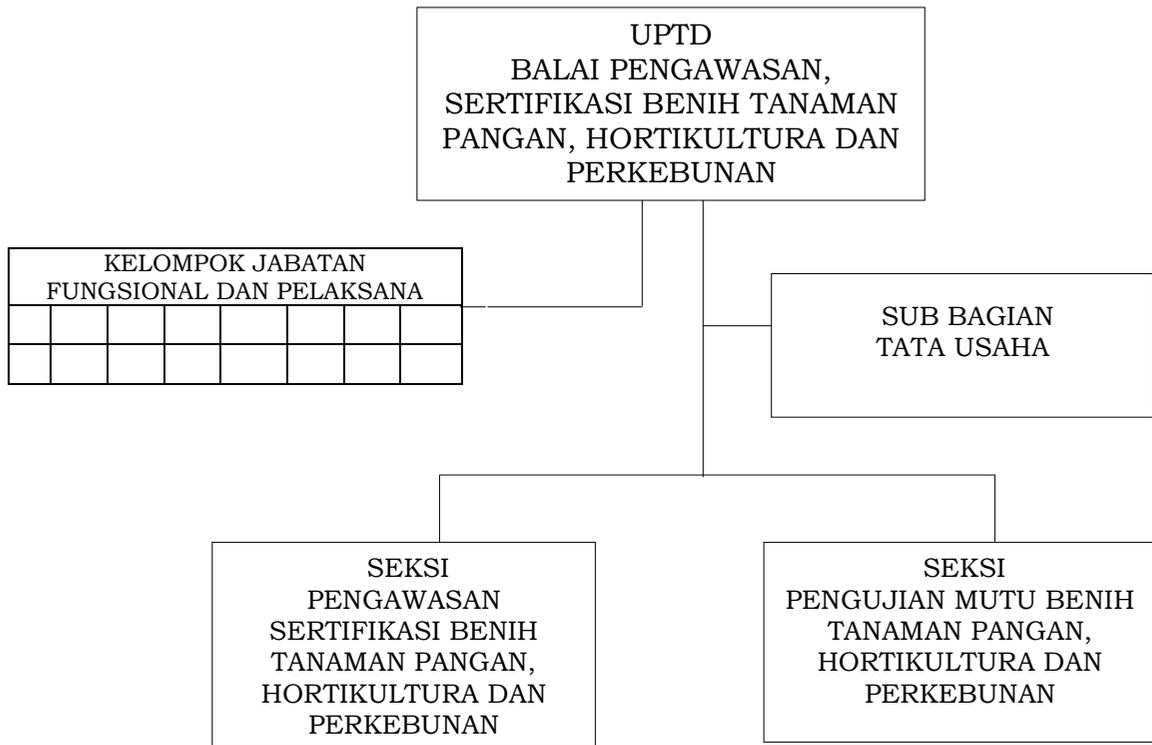
A. UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK



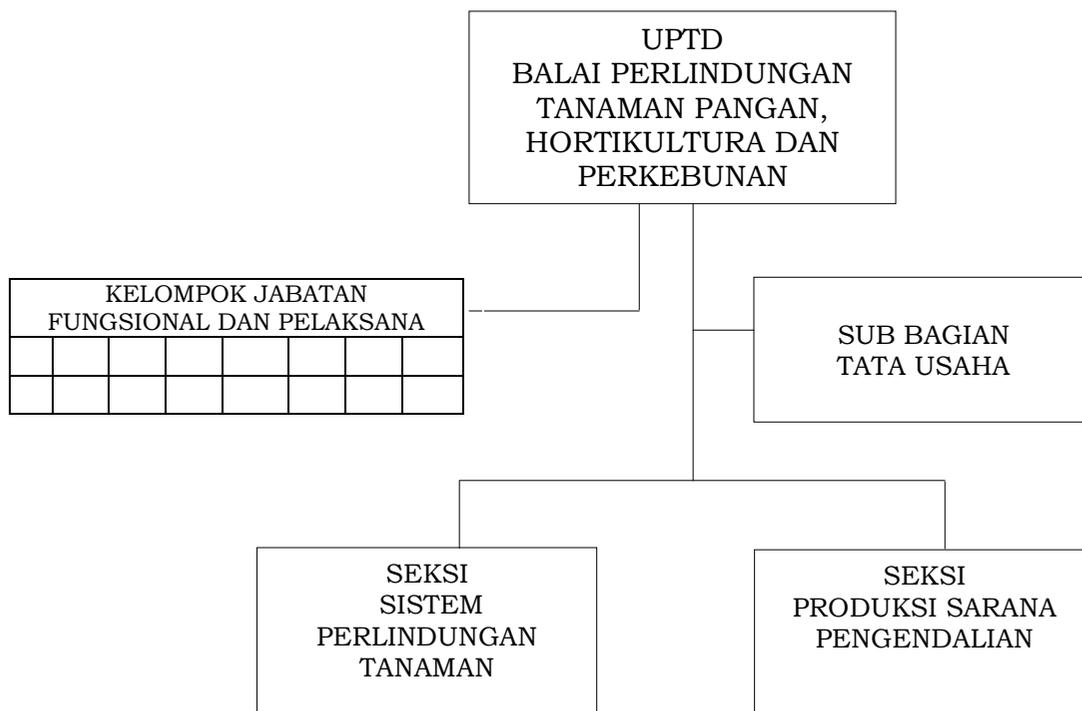
B. UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN



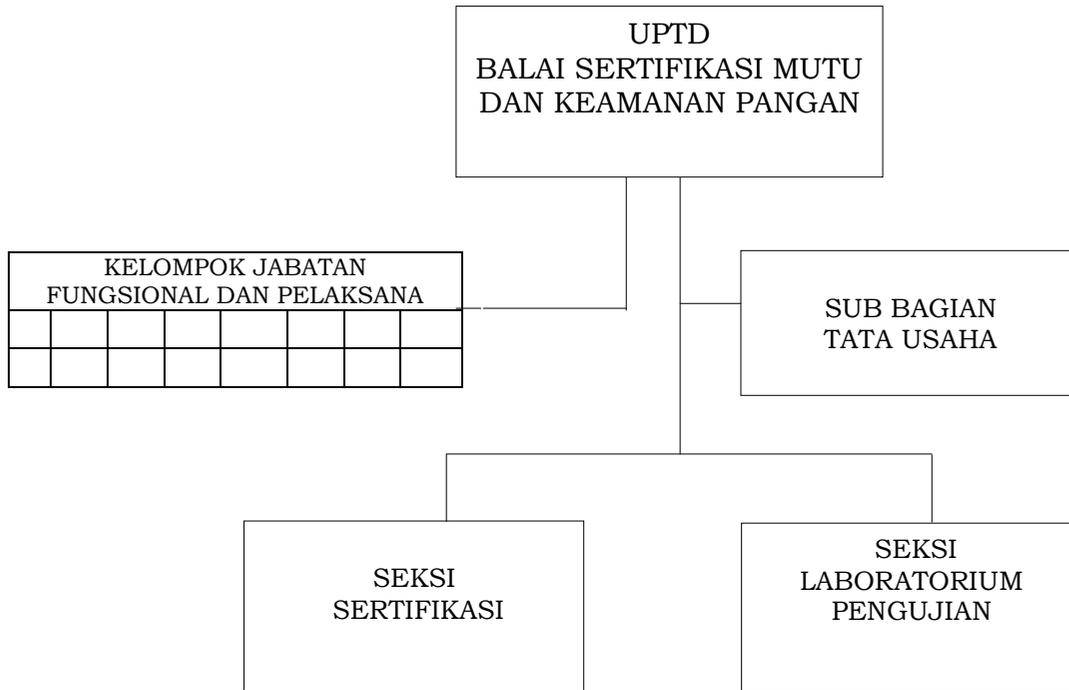
C. UPTD BALAI PENGAWASAN, SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN



D. UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

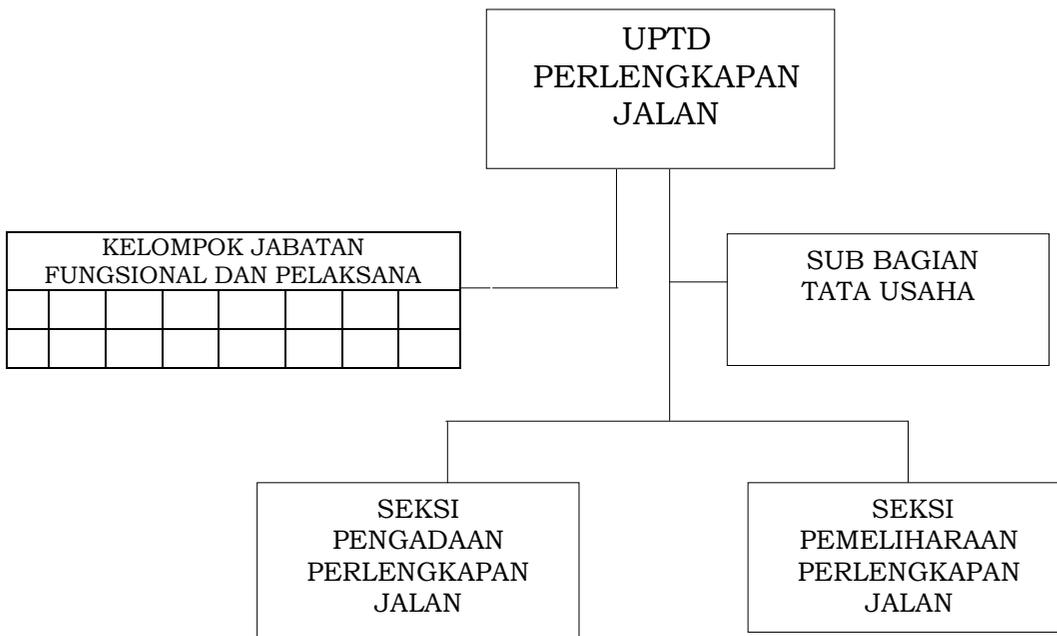


E. UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

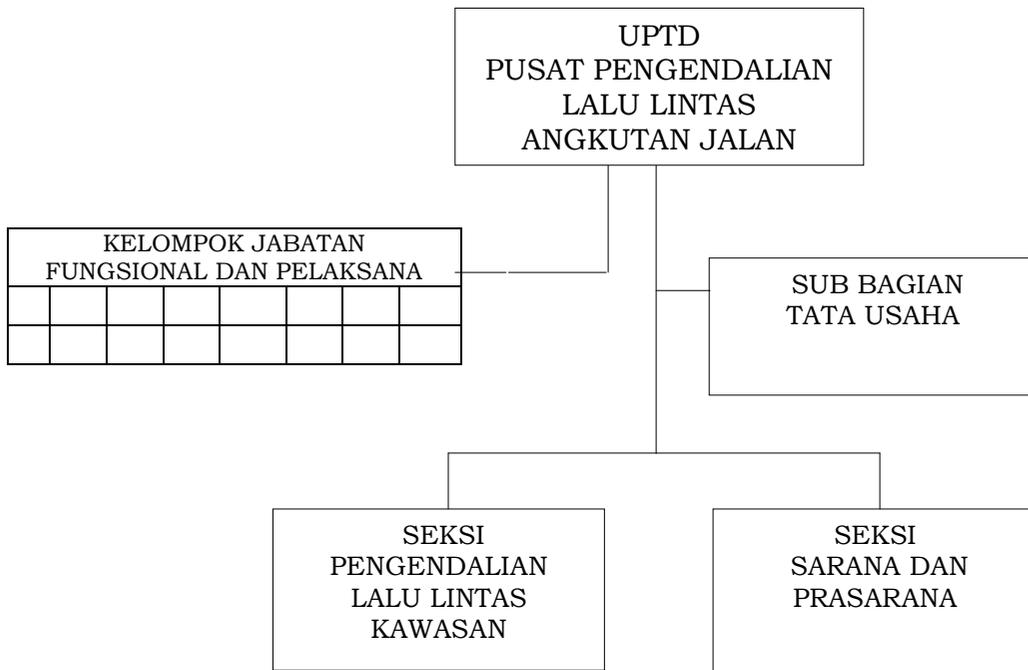


V. UPTD PADA DINAS PERHUBUNGAN

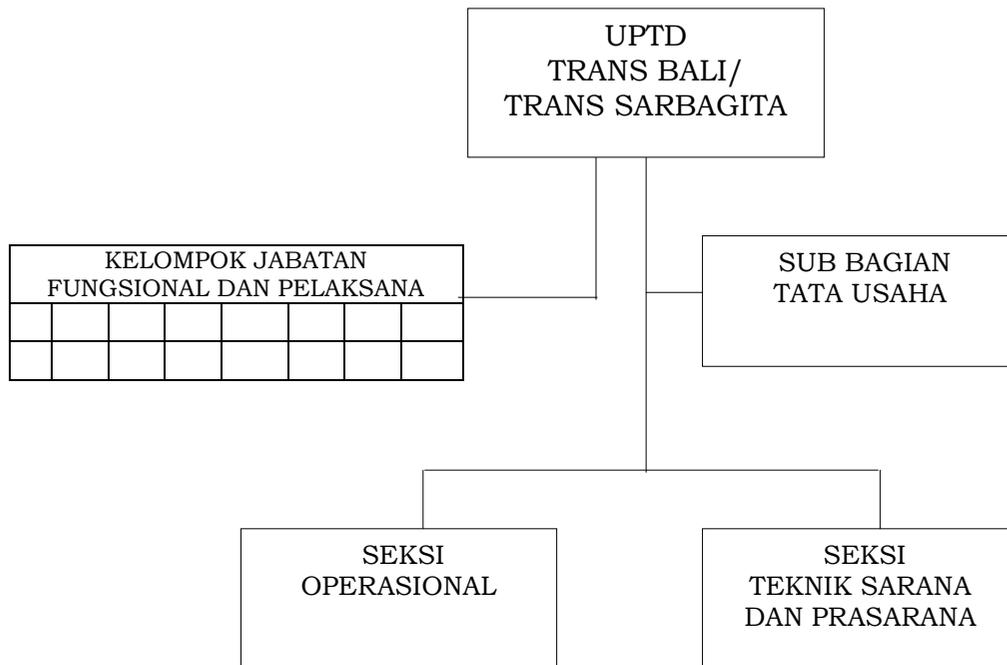
A. UPTD PERLENGKAPAN JALAN



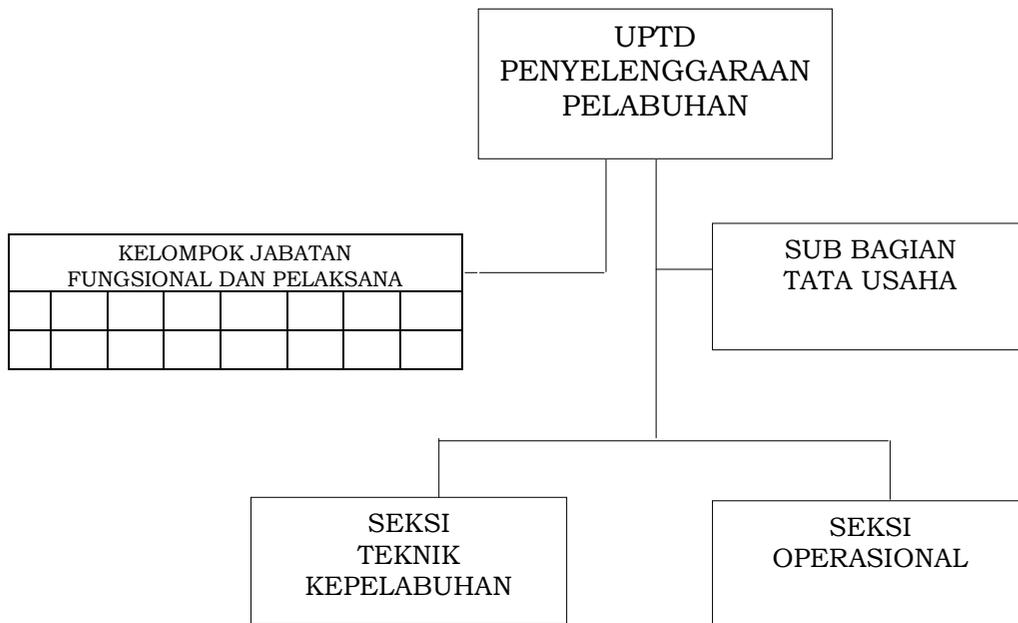
B. UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



C. UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

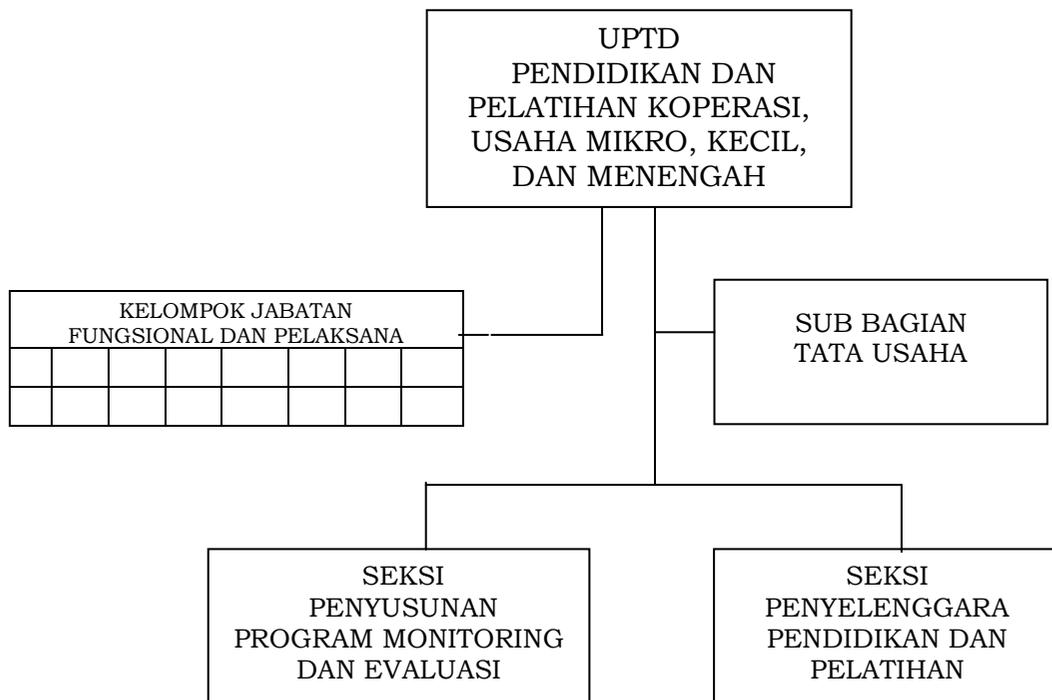


D. UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN



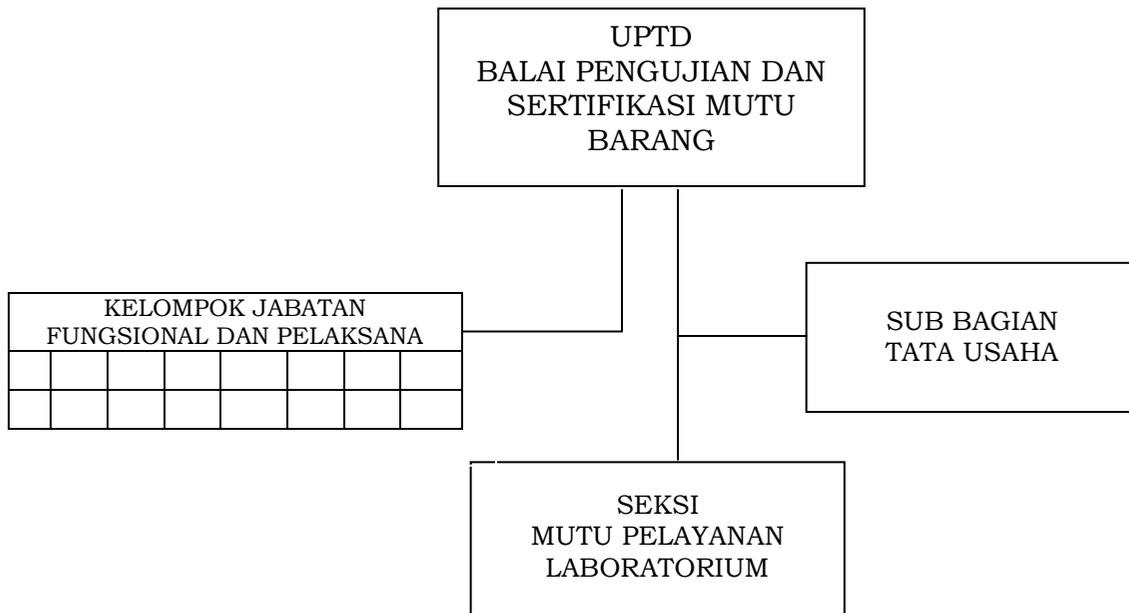
VI. UPTD PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

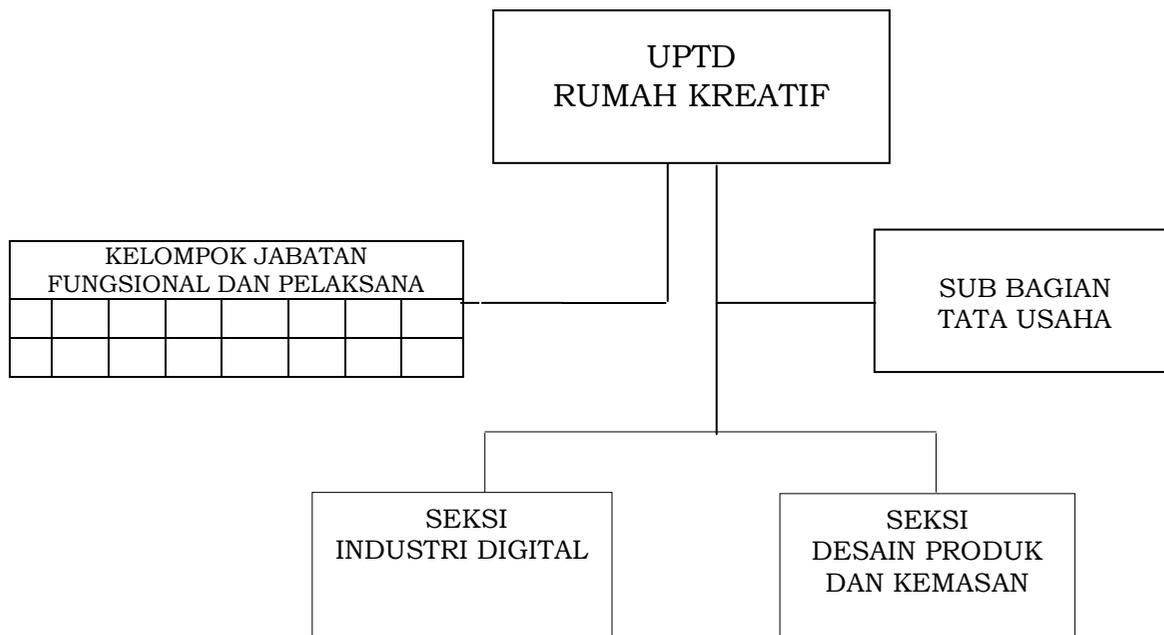


VII. UPTD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

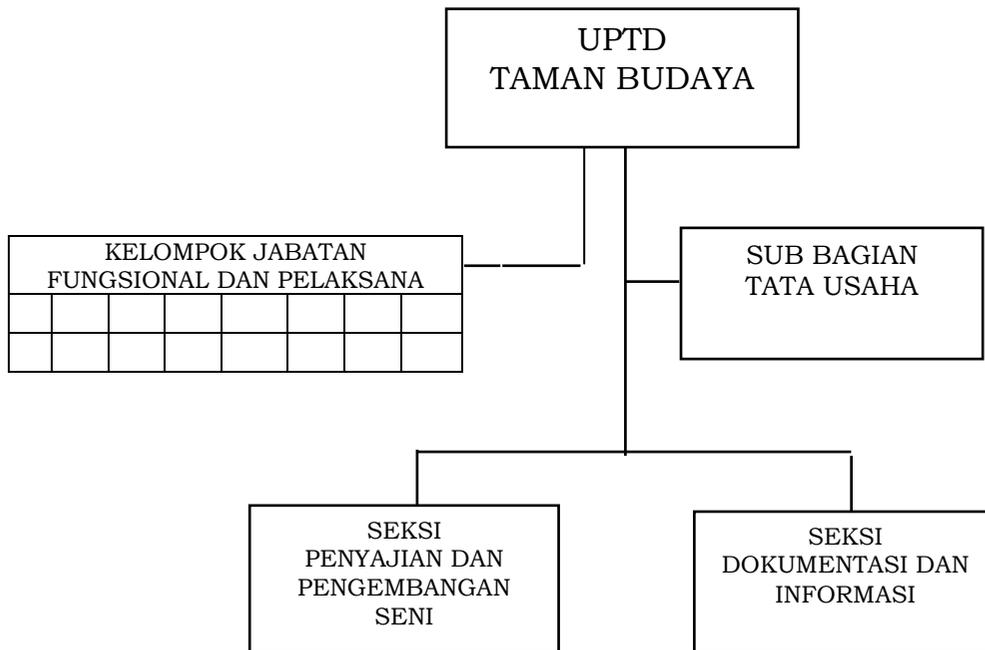


B. UPTD RUMAH KREATIF

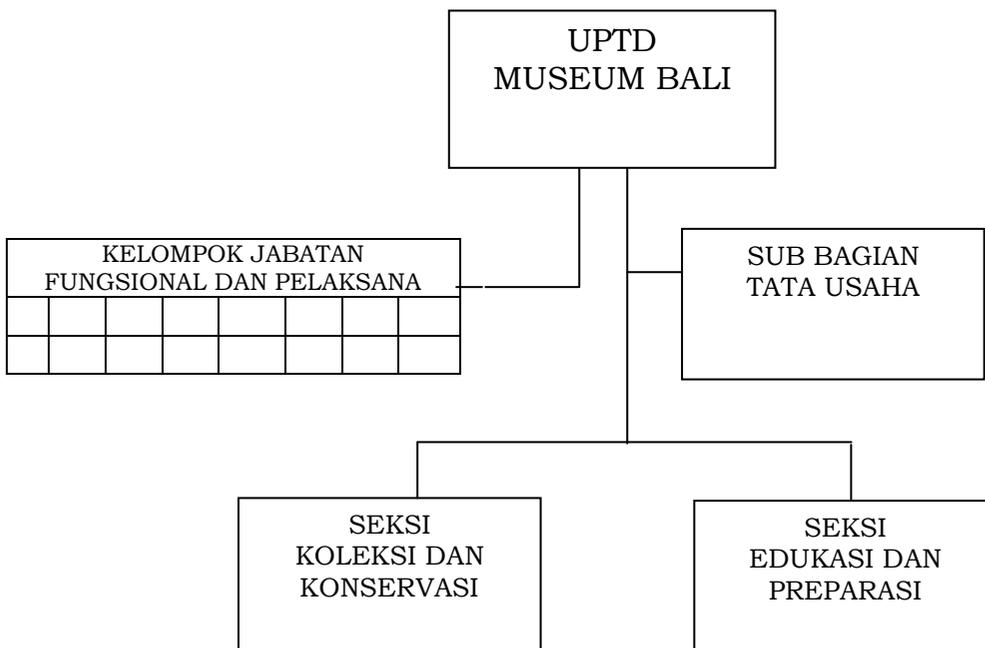


VIII. UPTD PADA DINAS KEBUDAYAAN

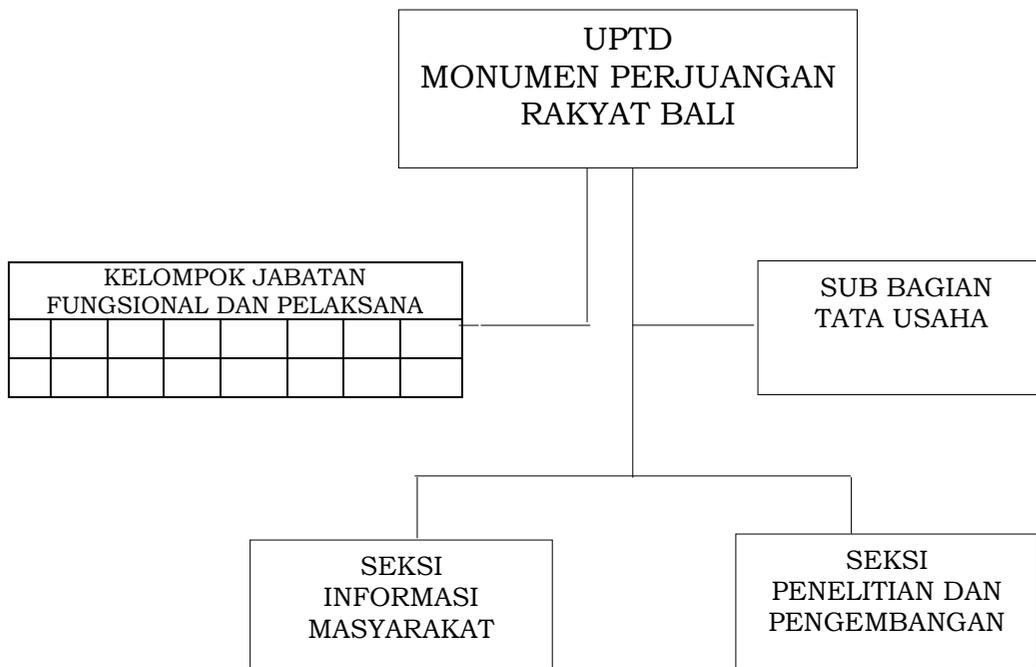
A. UPTD TAMAN BUDAYA



B. UPTD MUSEUM BALI

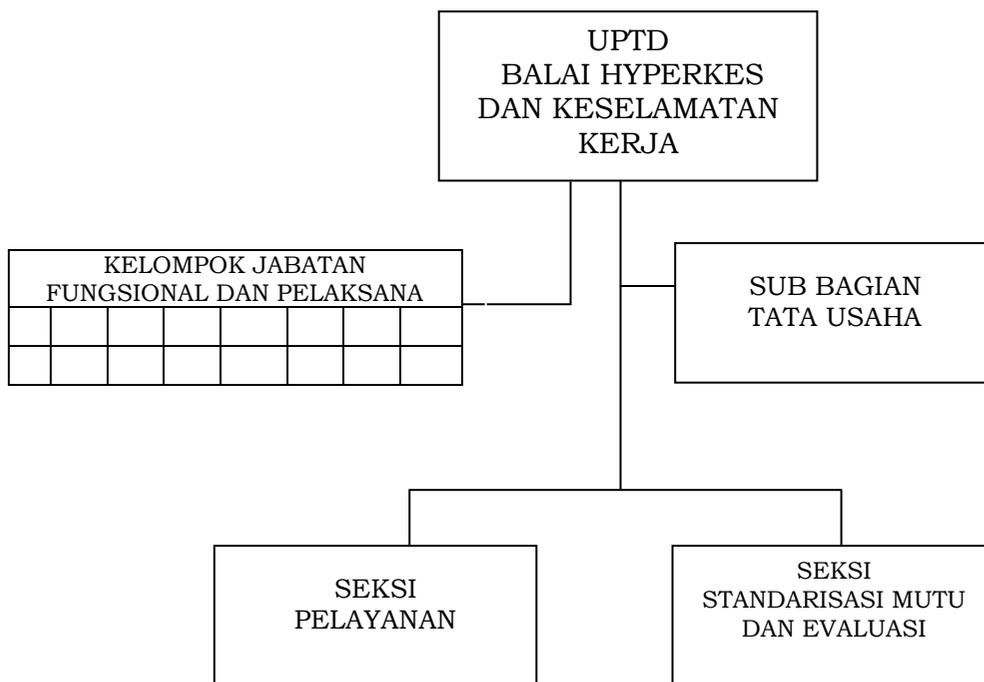


C. UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI

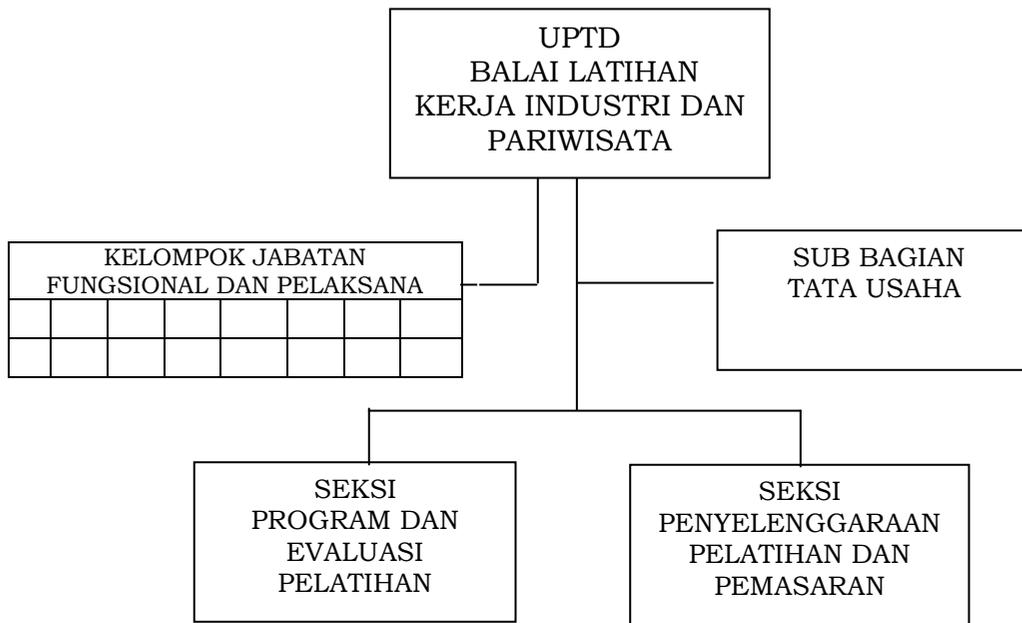


IX. UPTD PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

A. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

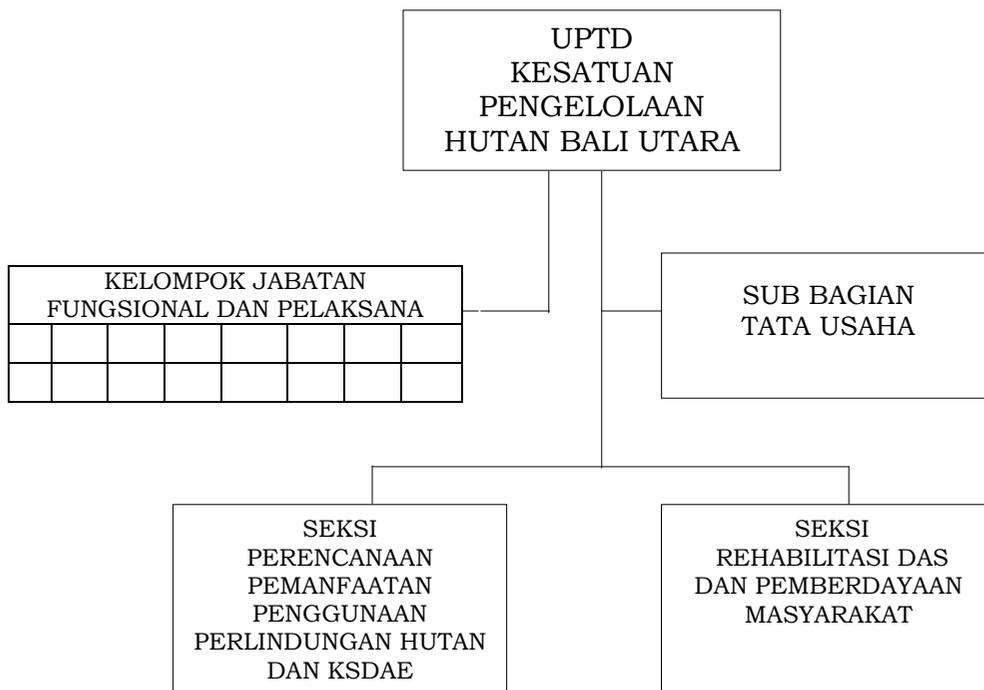


B. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

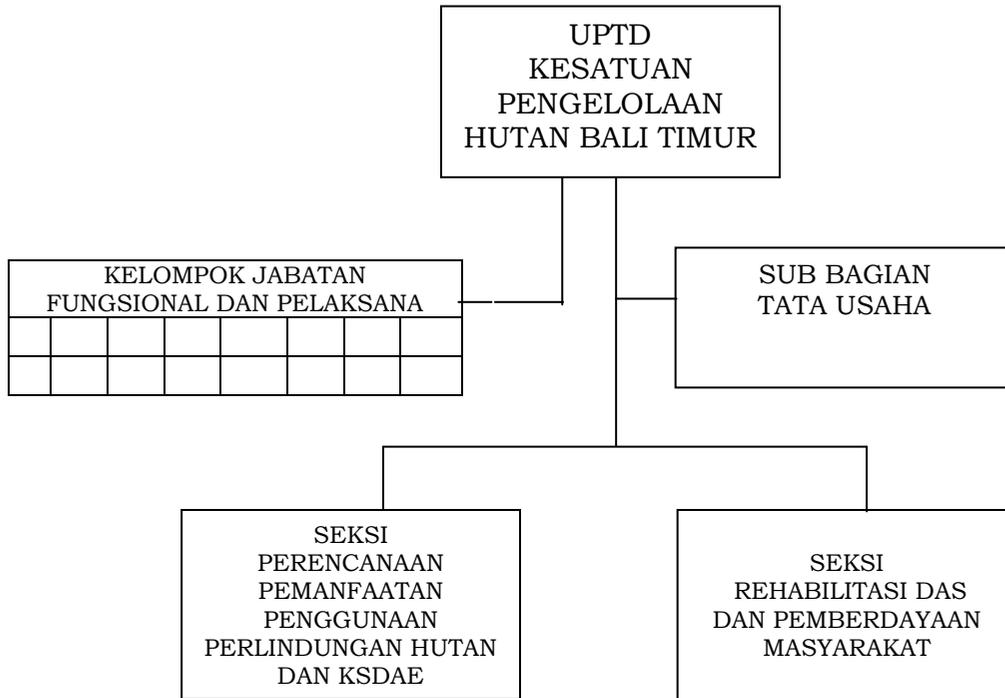


X. UPTD PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

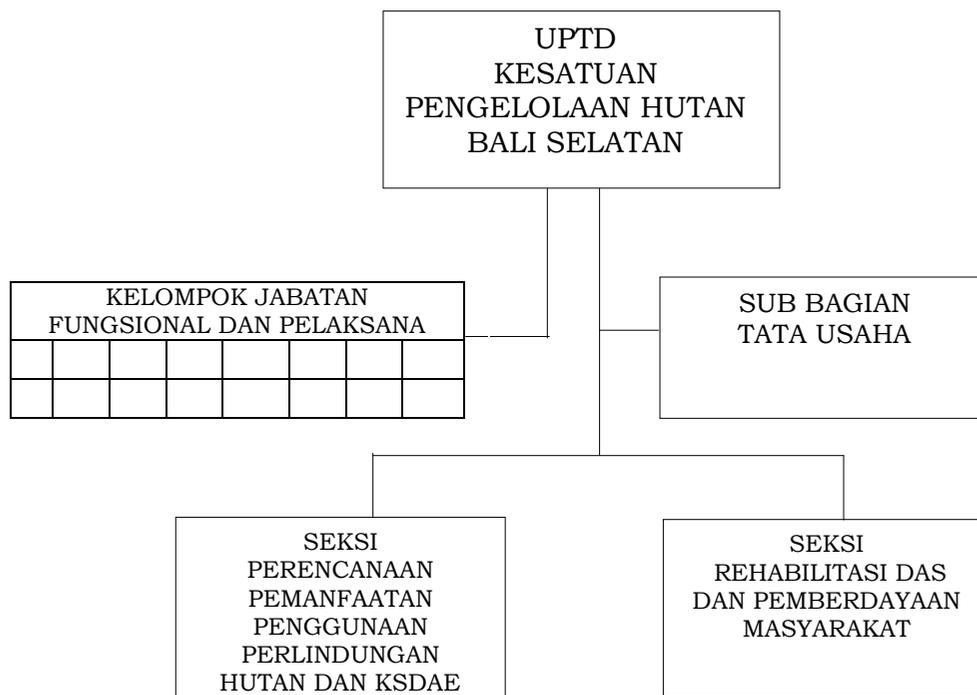
A. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA



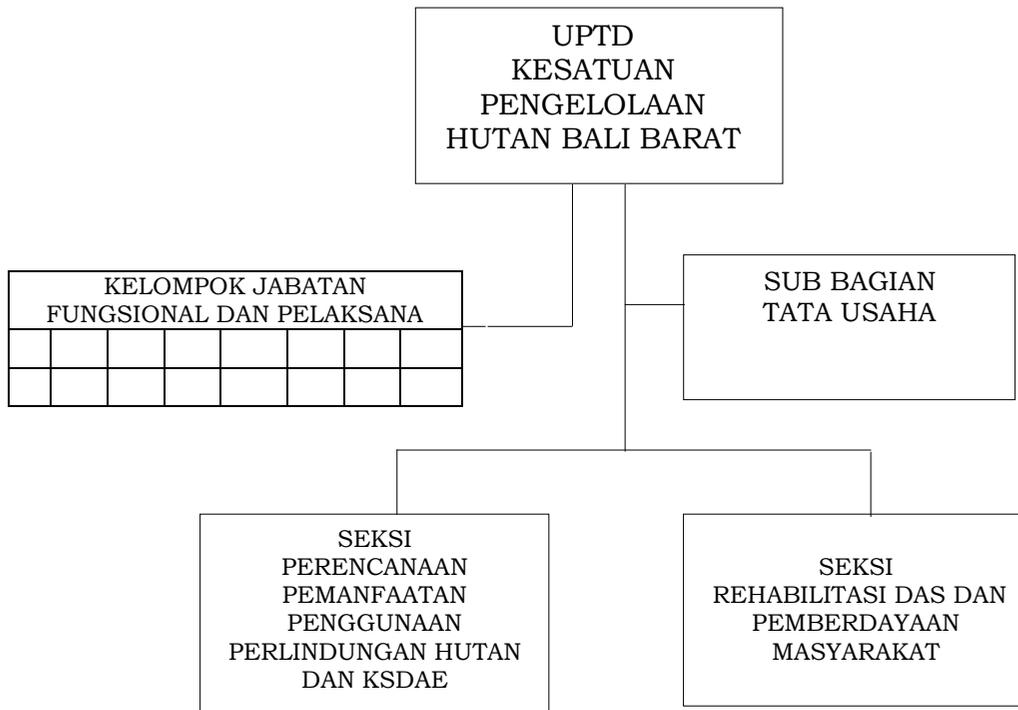
B. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR



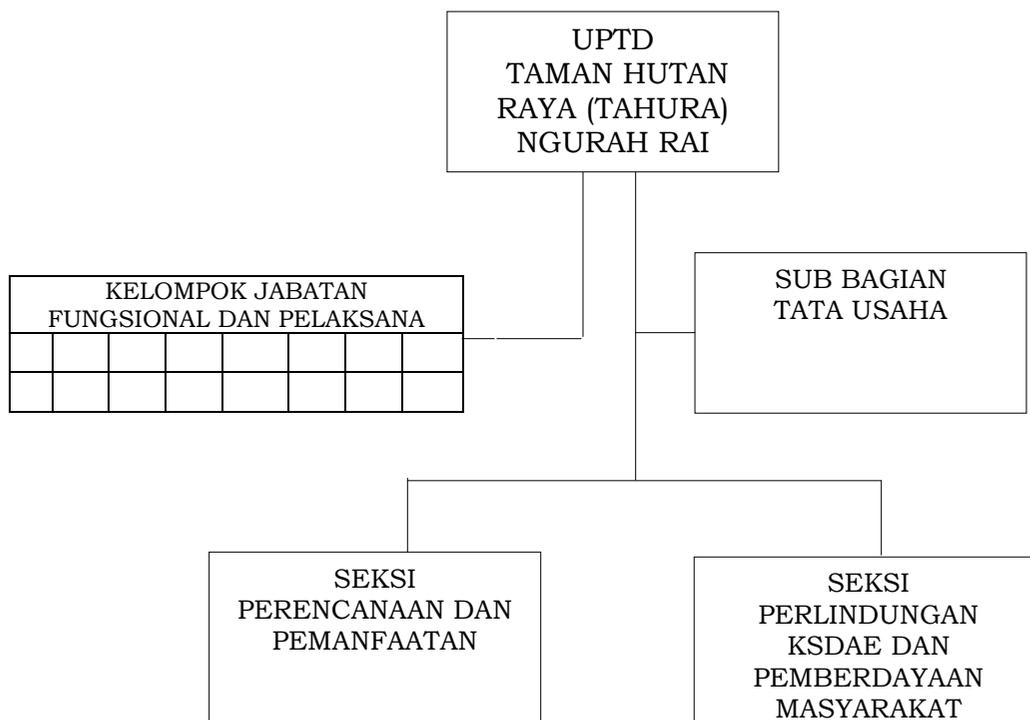
C. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN



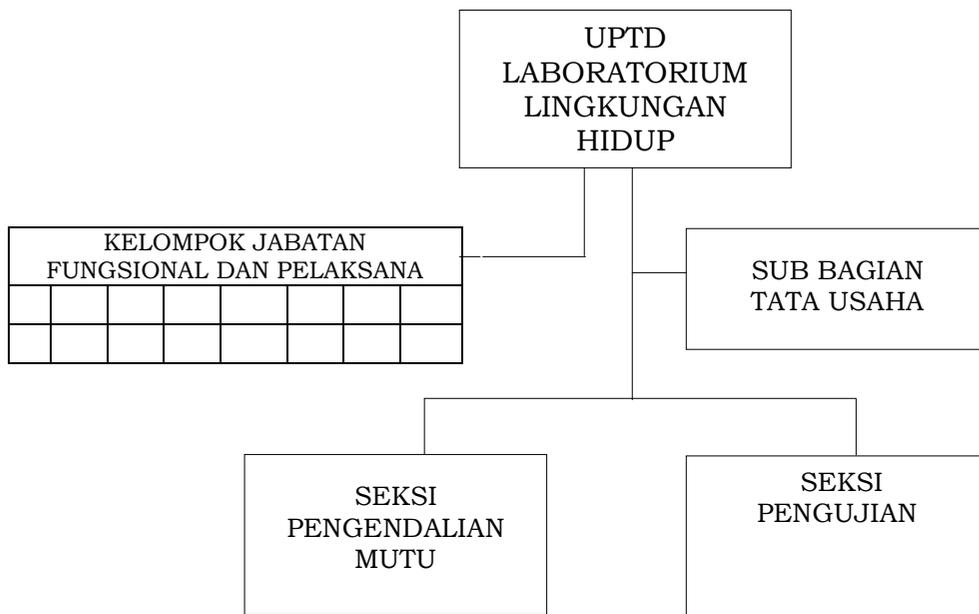
D. UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT



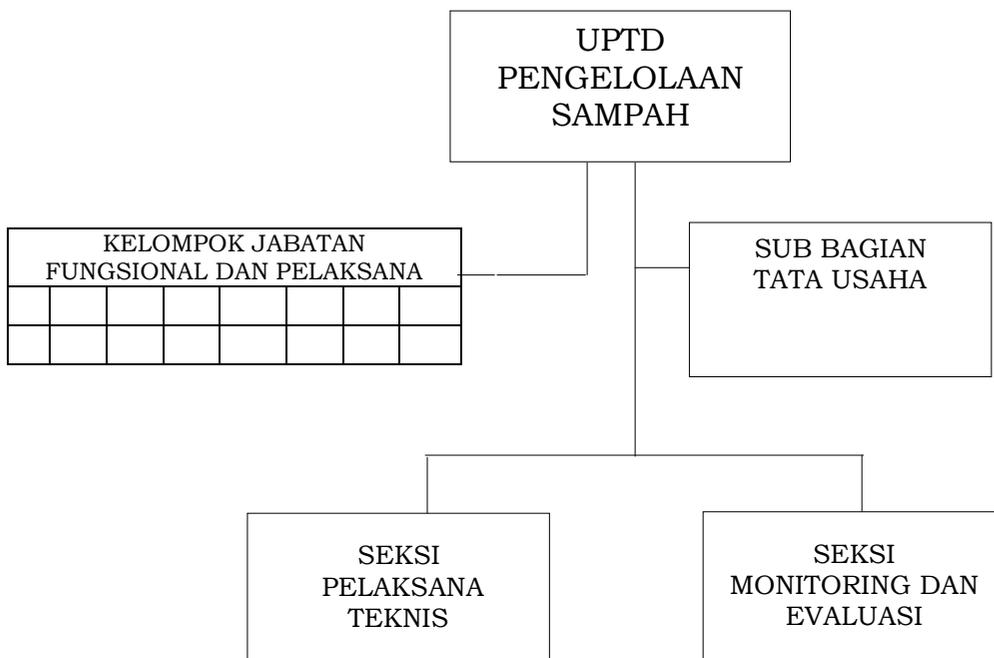
E. UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) NGURAH RAI



F. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

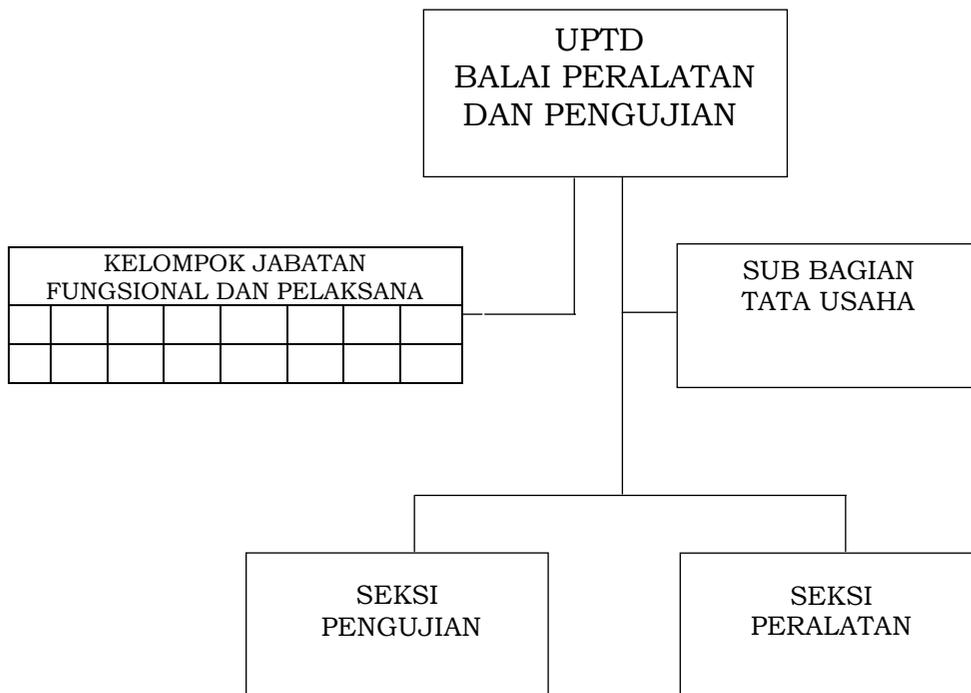


G. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

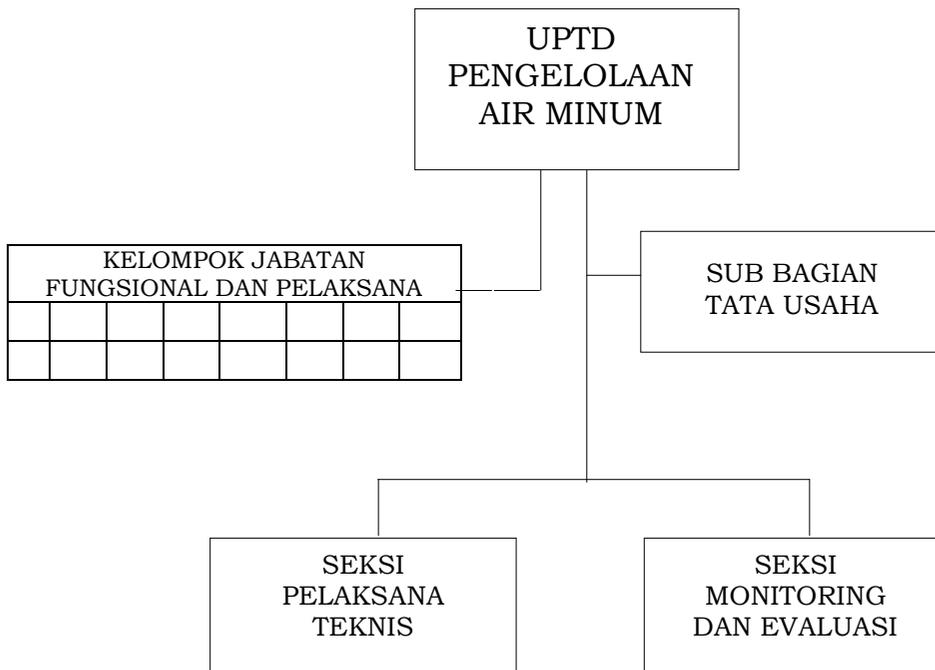


XI. UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

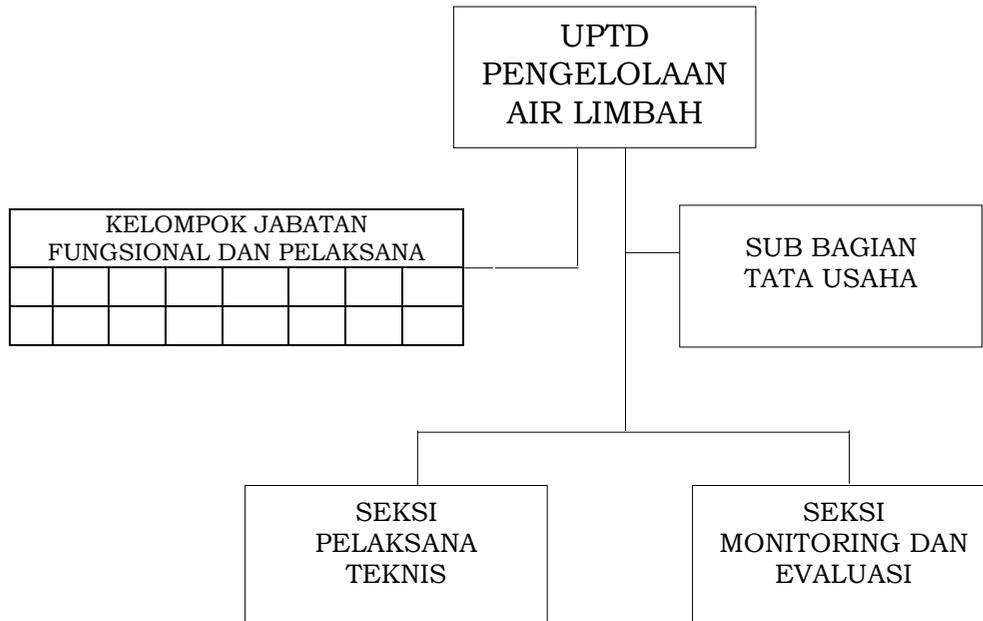
A. UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN



B. UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM

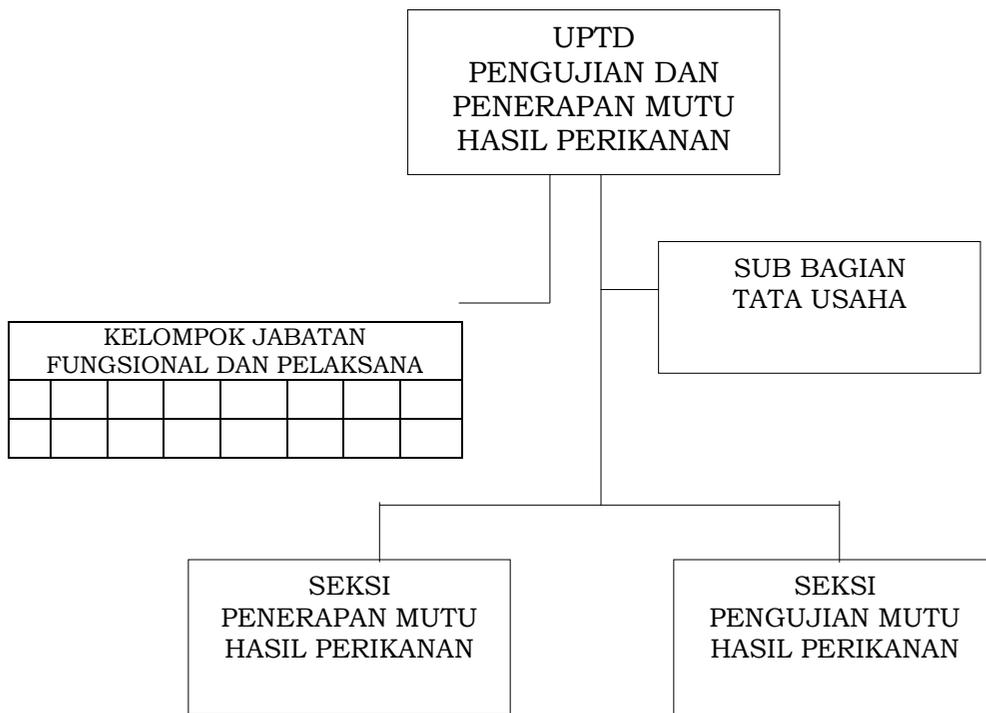


C. UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

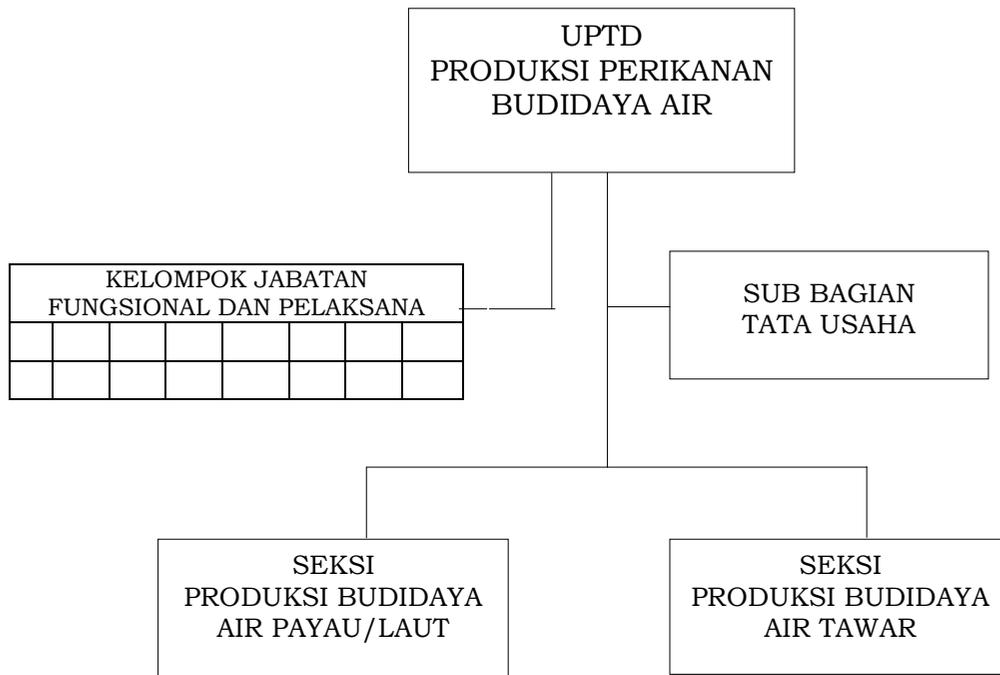


XII. UPTD PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

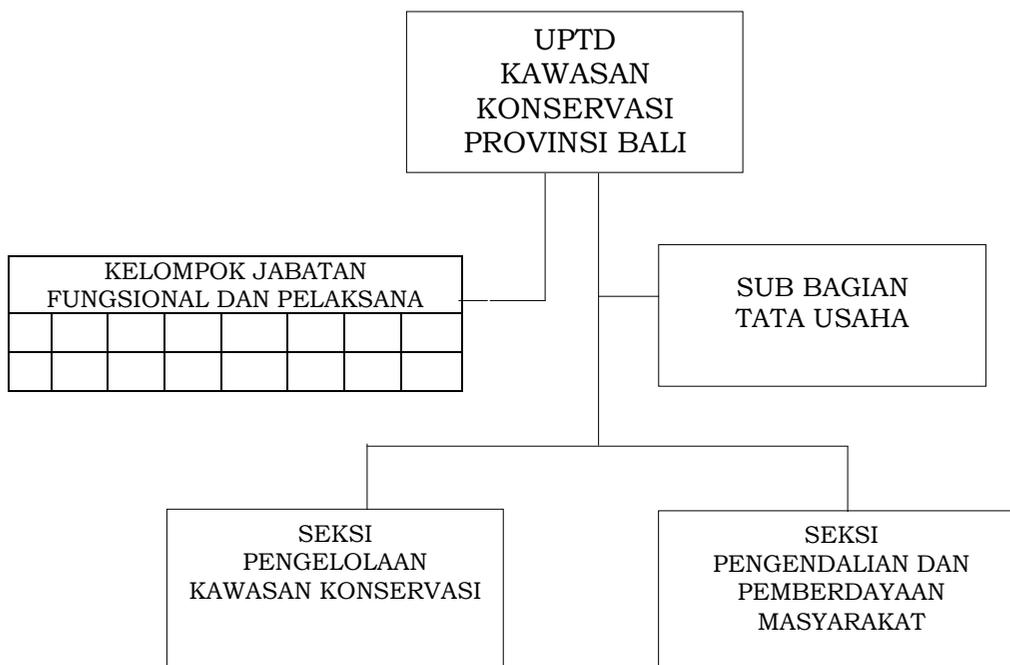
A. UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



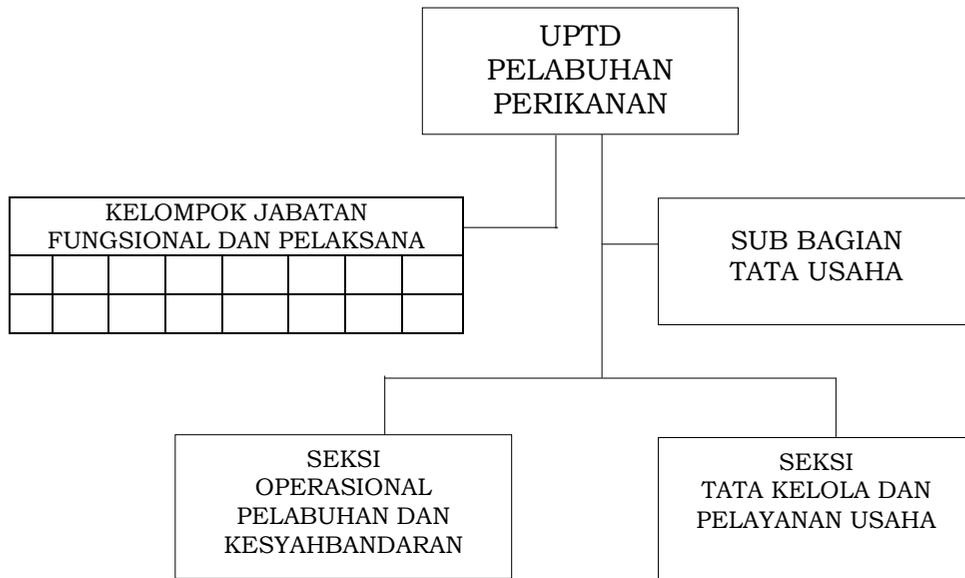
B. UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA



C. UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI

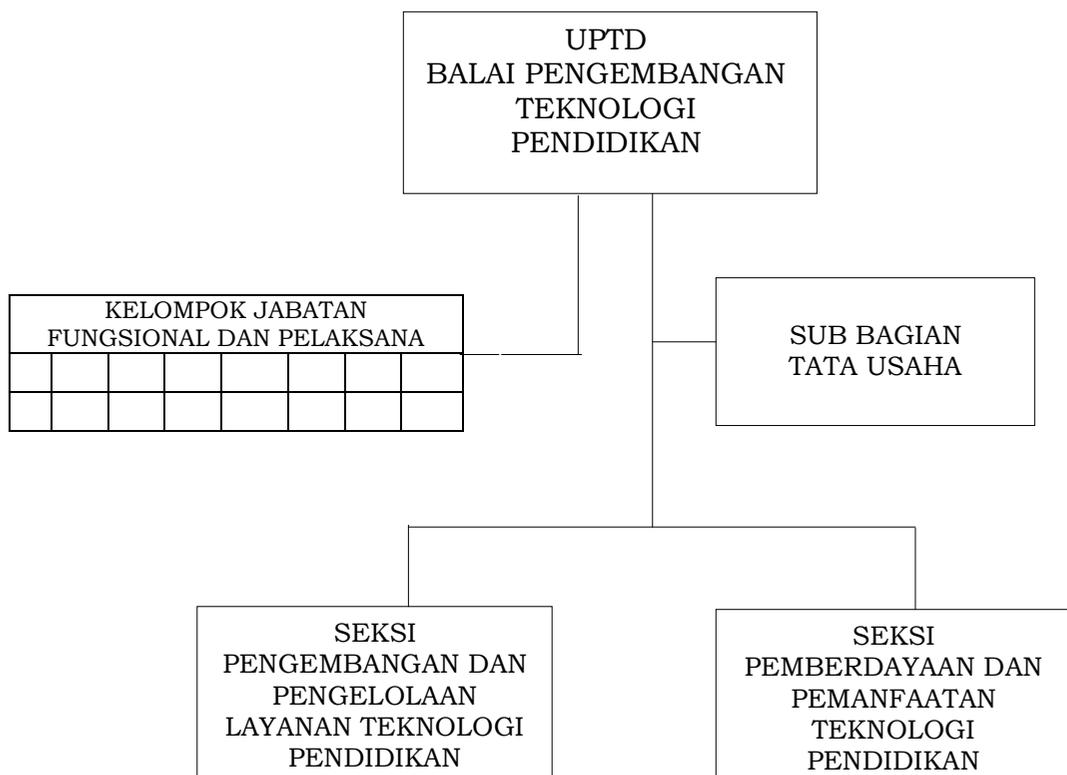


D. UPTD PELABUHAN PERIKANAN

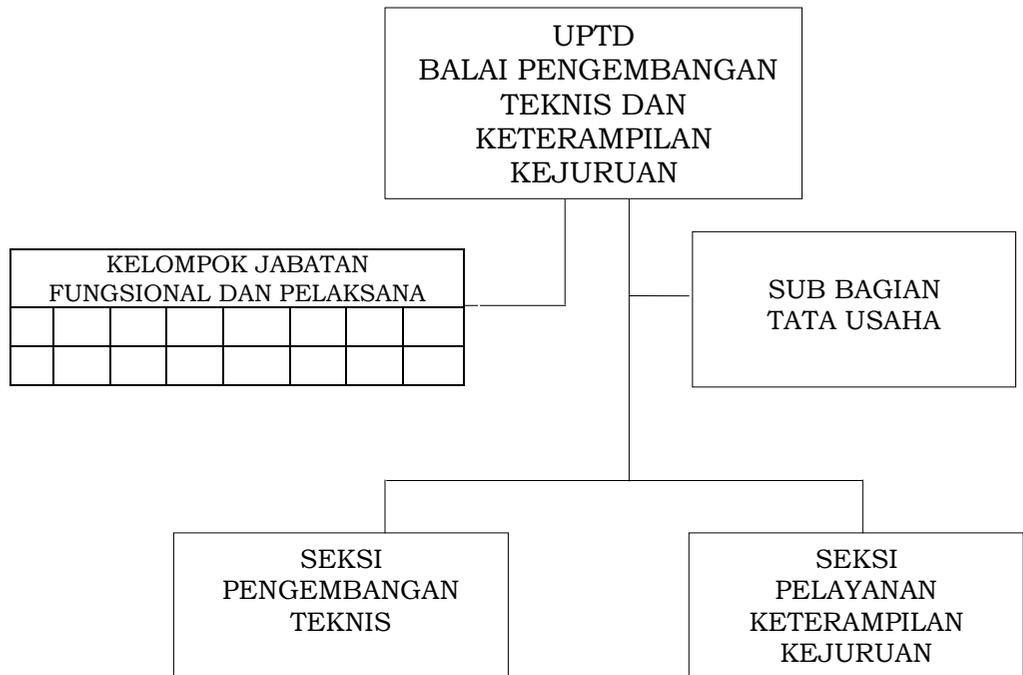


XIII. UPTD PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

A. UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN



B. UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN



SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI TERDIRI ATAS:

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG:

1. SMA NEGERI 1 BANJAR
2. SMA NEGERI 2 BANJAR
3. SMA NEGERI 1 SINGARAJA
4. SMA NEGERI 2 SINGARAJA
5. SMA NEGERI 3 SINGARAJA
6. SMA NEGERI 4 SINGARAJA
7. SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
8. SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
9. SMA NEGERI 1 GEROKGAK
10. SMA NEGERI 2 GEROKGAK
11. SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
12. SMA NEGERI 1 SAWAN
13. SMA NEGERI 1 SERIRIT
14. SMA NEGERI 1 SUKASADA
15. SMA NEGERI 1 TEJAKULA
16. SMA NEGERI 2 TEJAKULA

17. SMK NEGERI 1 SINGARAJA
18. SMK NEGERI 2 SINGARAJA
19. SMK NEGERI 3 SINGARAJA
20. SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
21. SMK NEGERI 1 SAWAN
22. SMK NEGERI 1 SERIRIT
23. SMK NEGERI 2 SERIRIT
24. SMK NEGERI 1 SUKASADA
25. SMK NEGERI 1 TEJAKULA
26. SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU
27. SMK NEGERI 1 GEROKGAK
28. SMK NEGERI 2 TEJAKULA
29. SMK NEGERI 1 BANJAR
30. SMA NEGERI BALI MANDARA
31. SMK NEGERI BALI MANDARA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BADUNG:

32. SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
33. SMA NEGERI 2 ABIANSEMAL
34. SMA NEGERI 1 KUTA
35. SMA NEGERI 2 KUTA
36. SMA NEGERI 1 KUTA SELATAN
37. SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN
38. SMA NEGERI 3 KUTA SELATAN
39. SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
40. SMK NEGERI 2 KUTA SELATAN
41. SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
42. SMA NEGERI 2 KUTA UTARA
43. SMA NEGERI 1 MENGWI
44. SMA NEGERI 2 MENGWI
45. SMA NEGERI 3 MENGWI
46. SMK NEGERI 1 MENGWI
47. SMA NEGERI 1 PETANG
48. SMK NEGERI 1 PETANG

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGLI:

49. SMA NEGERI 1 BANGLI
50. SMA NEGERI 2 BANGLI
51. SMA NEGERI 1 KINTAMANI
52. SMA NEGERI 1 SUSUT
53. SMA NEGERI 1 TEMBUKU
54. SMK NEGERI 1 BANGLI
55. SMK NEGERI 2 BANGLI
56. SMK NEGERI 3 BANGLI
57. SMK NEGERI 4 BANGLI
58. SMK NEGERI 1 KINTAMANI
59. SMK NEGERI 2 KINTAMANI
60. SMK NEGERI 3 KINTAMANI
61. SMK NEGERI 1 SUSUT
62. SMK NEGERI 1 TEMBUKU

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARANGASEM:

63. SMA NEGERI 1 BEBANDEM
64. SMA NEGERI 1 KUBU
65. SMA NEGERI 1 AMLAPURA
66. SMA NEGERI 2 AMLAPURA
67. SMA NEGERI 3 AMLAPURA
68. SMA NEGERI 1 MANGGIS
69. SMA NEGERI 1 RENDANG
70. SMA NEGERI 1 SELAT
71. SMA NEGERI 1 SIDEMEN
72. SMA NEGERI 1 ABANG
73. SMK NEGERI 1 ABANG
74. SMK NEGERI 1 KUBU
75. SMK NEGERI 2 KUBU
76. SMK NEGERI 1 MANGGIS

77. SMK NEGERI 1 AMLAPURA
78. SMK NEGERI 1 BEBANDEM

SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA DENPASAR:

79. SMA NEGERI 1 DENPASAR
80. SMA NEGERI 2 DENPASAR
81. SMA NEGERI 3 DENPASAR
82. SMA NEGERI 4 DENPASAR
83. SMA NEGERI 5 DENPASAR
84. SMA NEGERI 6 DENPASAR
85. SMA NEGERI 7 DENPASAR
86. SMA NEGERI 8 DENPASAR
87. SMA NEGERI 9 DENPASAR
88. SMA NEGERI 10 DENPASAR
89. SMA NEGERI 11 DENPASAR
90. SMA NEGERI 12 DENPASAR
91. SMK NEGERI 1 DENPASAR
92. SMK NEGERI 2 DENPASAR
93. SMK NEGERI 3 DENPASAR
94. SMK NEGERI 4 DENPASAR
95. SMK NEGERI 5 DENPASAR
96. SMK NEGERI 6 DENPASAR
97. SMK NEGERI 7 DENPASAR

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN:

98. SMA NEGERI 1 BATURITI
99. SMA NEGERI 1 KEDIRI
100. SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
101. SMA NEGERI 1 MARGA
102. SMA NEGERI 1 PENEHEL
103. SMA NEGERI 1 PUPUAN
104. SMA NEGERI 1 SELEMADEG
105. SMA NEGERI 1 TABANAN
106. SMA NEGERI 2 TABANAN
107. SMK NEGERI 1 TABANAN
108. SMK NEGERI 2 TABANAN
109. SMK NEGERI 3 TABANAN

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR:

110. SMA NEGERI 1 PAYANGAN
111. SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
112. SMA NEGERI 1 GIANYAR
113. SMA NEGERI 2 GIANYAR
114. SMA NEGERI 1 SUKAWATI
115. SMA NEGERI 2 SUKAWATI
116. SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
117. SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
118. SMA NEGERI 1 UBUD
119. SMK NEGERI 1 GIANYAR
120. SMK NEGERI 1 SUKAWATI
121. SMK NEGERI 2 SUKAWATI
122. SMK NEGERI 3 SUKAWATI
123. SMK NEGERI 1 TAMPAK SIRING
124. SMK NEGERI 1 TEGALLALANG
125. SMK NEGERI 1 MAS UBUD
126. SMK NEGERI 2 TEGALLALANG

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG:

127. SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
128. SMA NEGERI 1 DAWAN
129. SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
130. SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
131. SMA NEGERI SATU ATAP KLUMPU

- 132. SMA NEGERI SATU ATAP NUSA PENIDA
- 133. SMA NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN
- 134. SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
- 135. SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG
- 136. SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA:

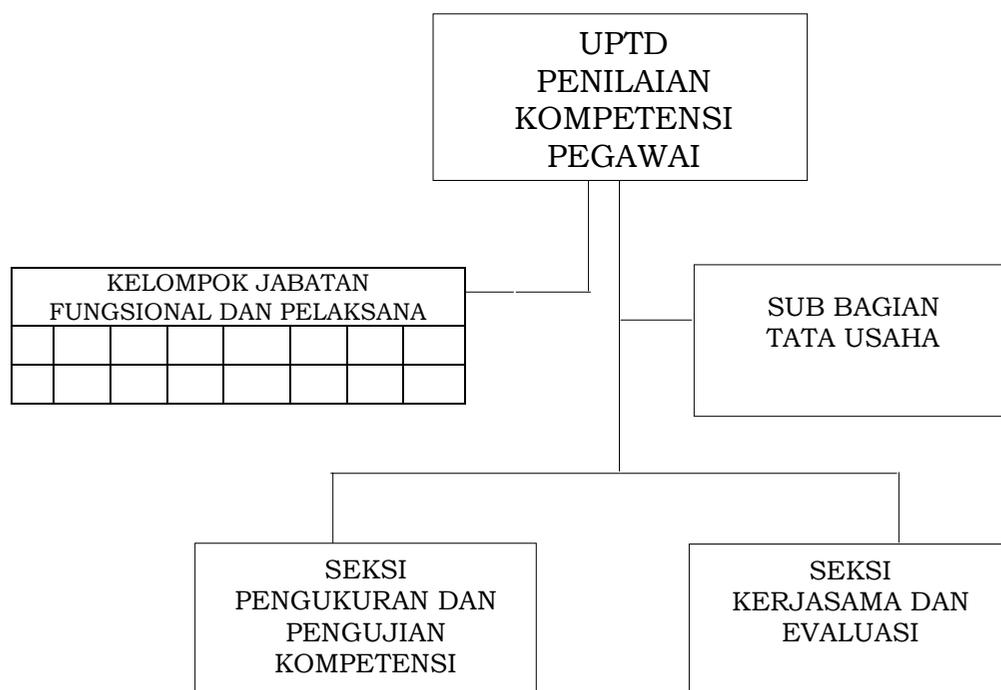
- 137. SMA NEGERI 1 NEGARA
- 138. SMA NEGERI 2 NEGARA
- 139. SMA NEGERI 3 NEGARA
- 140. SMA NEGERI 1 MELAYA
- 141. SMA NEGERI 2 MENDOYO
- 142. SMA NEGERI 1 MENDOYO
- 143. SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
- 144. SMK NEGERI 1 NEGARA
- 145. SMK NEGERI 2 NEGARA
- 146. SMK NEGERI 3 NEGARA
- 147. SMK NEGERI 4 NEGARA
- 148. SMK NEGERI 5 NEGARA

DAFTAR SLB NEGERI SE BALI

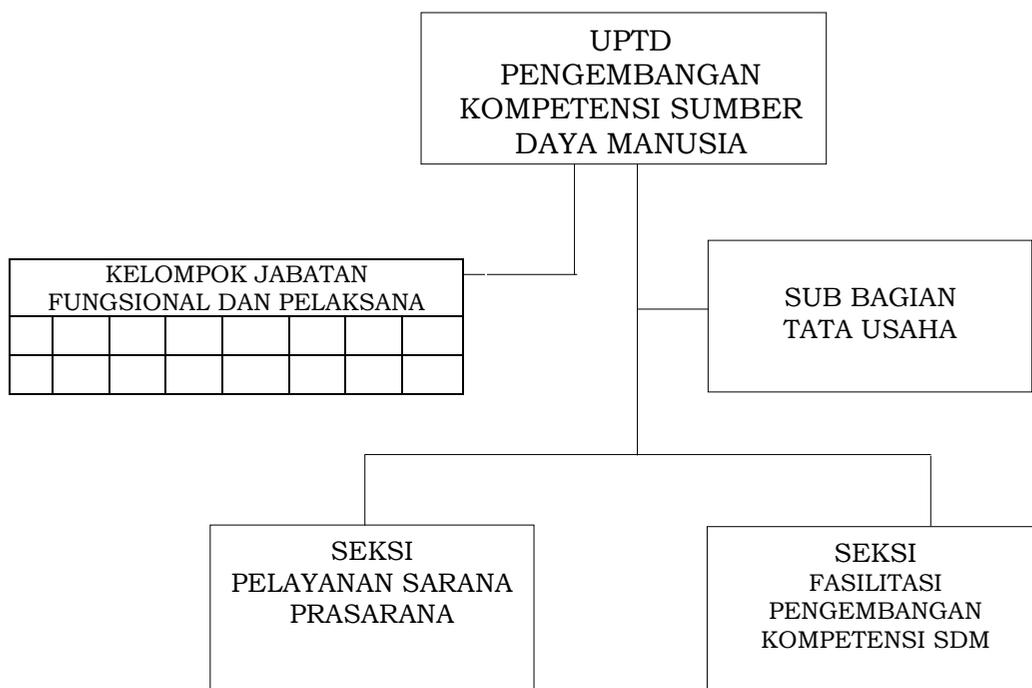
- 149. SLB NEGERI 1 BULELENG
- 150. SLB NEGERI 2 BULELENG
- 151. SLB NEGERI 1 JEMBRANA
- 152. SLB NEGERI 1 KARANGASEM
- 153. SLB NEGERI 1 TABANAN
- 154. SLB NEGERI 1 BADUNG
- 155. SLB NEGERI 1 GIANYAR
- 156. SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG
- 157. SLB NEGERI 1 BANGLI
- 158. SLB NEGERI 1 DENPASAR
- 159. SLB NEGERI 2 DENPASAR
- 160. SLB NEGERI 3 DENPASAR

XIV. UPTD PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

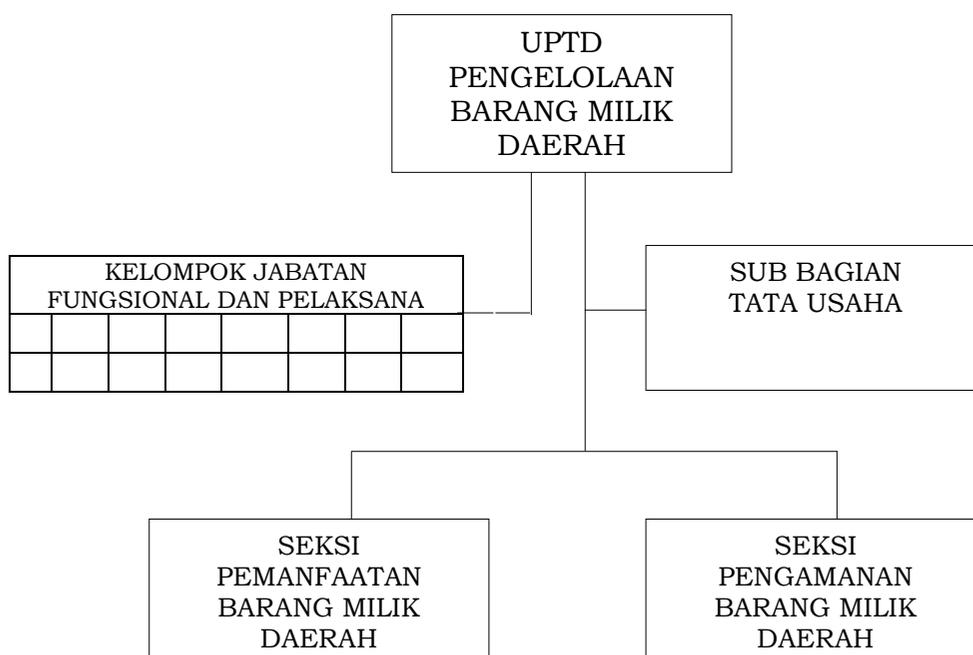
A. UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI



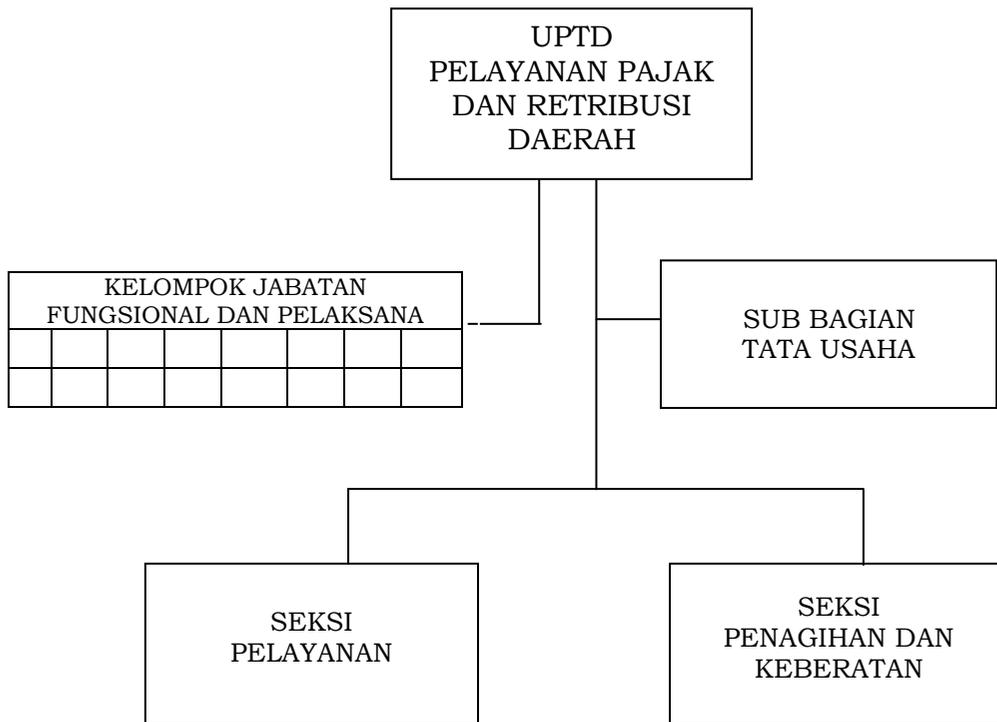
B. UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA



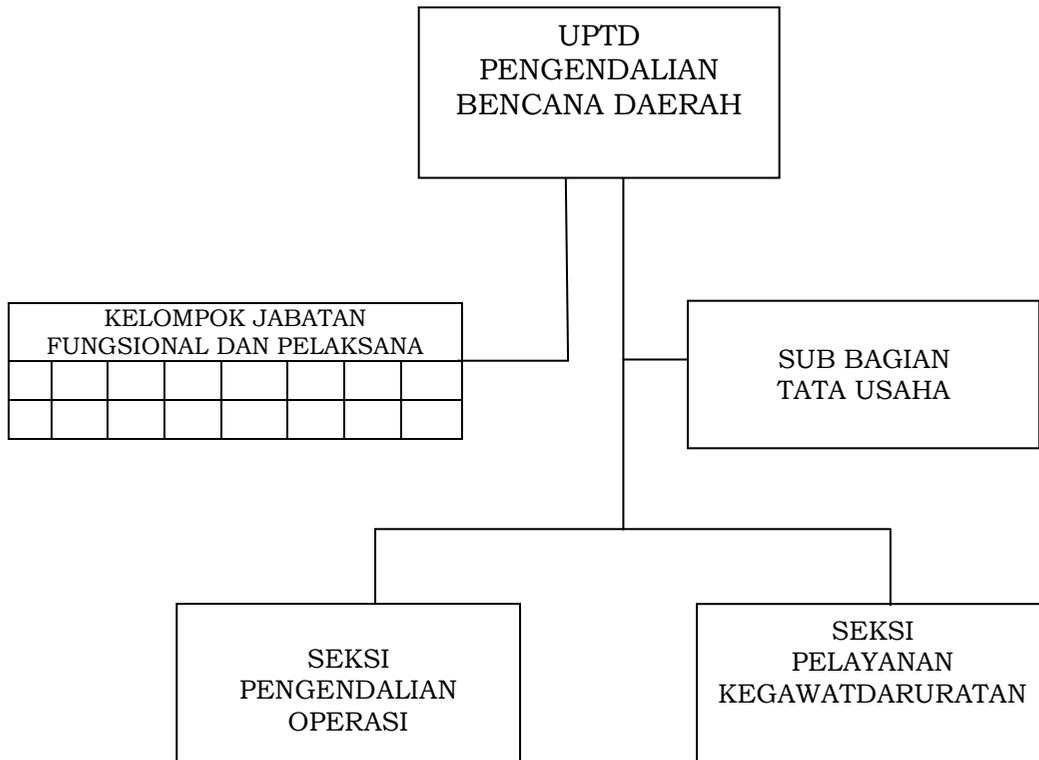
XV. UPTD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



XVI. UPTD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



XVII. UPTD PADA BADAN PENANANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE